



BAB III

PENDEKATAN KEAMANAN SEKTOR EKONOMI DALAM KEBIJAKAN MALAYSIA TERHADAP PELABUHAN JOHOR

Menurut Barry Buzan dkk, tujuan utama dalam keamanan ekonomi, dipetakan sebagai isu yang tidak terselesaikan dan dibutuhkan perdebatan yang cukup serius tentang dalam hubungan internasional terhadap hubungan antara struktur politik yang anarki dan sistem ekonomi pasar. Dalam Merkantilisme dan Neo-merkantilism, meletakkan politik sebagai pemecah masalah dalam isu ekonomi. Serta, melihat bagaimana

posisi negara dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya. Negara, harus ikut turun tangan dalam isu ekonomi. Kebijakan pasar haruslah diatur oleh negara. Lain halnya dalam Liberalisme, meletakkan ekonomi sebagai akar dalam perdebatan tatanan sosial. Serta, membiarkan pasar untuk sebebannya mengatur kebijakan tanpa adanya intervensi dari negara.

Negara dibutuhkan dalam pembuatan hukum dan menjaga keamanan politik-militer serta mendukung tatanan sosial yang mana pasar tidak mampu melakukannya. Sedangkan para sosialis, memperdebatkan ekonomi adalah akar masalah tatanan sosial. Tujuan mereka ialah membuat ekonomi berlandaskan sosial dan politik untuk mencapai keadilan dan kesetaraan. Yang pada umumnya, “yang lemah melawan yang kuat” (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 95-96)

Sektor ekonomi memiliki keberagaman aktor mulai dari individu, subsistem hingga, negara. Gagasan tentang keamanan ekonomi sendiri banyak diperdebatkan dalam ekonomi politik serta struktur ekonomi pasar. Hal ini pun menjadikan suatu perbedaan pandangan mengenai hal tersebut. Seperti yang dijelaskan ada gagasan ekonomi dari merkantilisme, liberal dan sosialis. Ketiga gagasan tersebut memiliki pandangan yang berbeda mengenai masalah ekonomi serta tujuan dari sekuritisasi ekonomi (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 95).

Ada keberagaman isu-isu yang ada pada kewanaman ekonomi. Isu-isu yang dapat memunculkan masalah terhadap suatu negara yaitu antara lain, mempertahankan produksi militer di pasar global, investasi yang buruk,

perdagangan illegal, dan ancaman globalisasi ekonomi jika menimbulkan efek negatif daripada mendapatkan keuntungan (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 98).

2.2 Ancaman dan Kerentanan Ekonomi

Apa yang merupakan ancaman ekonomi eksistensial tergantung pada obyek referensi. Bagi individu, keamanan ekonomi paling dapat dipahami jelas dalam hal kebutuhan dasar manusia. Individu hidup atau mati sesuai dengan ketentuan kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupan manusia: makanan, air, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan yang memadai. Apa yang disebut ketahanan pangan dan seruan untuk memberantas kelaparan massal jelas dalam bidang kebutuhan dasar manusia, seperti halnya bantuan bencana. Tapi di luar dasar-dasar ini, tidak jelas bahwa individu dapat secara sah di sekuritisasi di sektor ekonomi. Masalah tingkat kesejahteraan relatif, diferensial akses ke sumber daya yang lebih eksotis, dan bahkan pengangguran mungkin sangat penting bagi individu dan memang bagi masyarakat, tetapi dalam sektor ekonomi bukanlah tentang bagaimana cara bertahan hidup. Ancaman dari sektor ekonomi ini dapat terjadi jika suatu negara mengedepankan kebutuhan ekonomi berdasarkan kesejahteraan masyarakatnya (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 104-106).

Dalam perspektif liberal, perusahaan, seperti yang dibahas sebelumnya, umumnya kurang memiliki kualitas eksistensial yang

diperlukan untuk sekuritisasi ekonomi kecuali, seperti halnya dengan bank-bank besar, kehancurannya mengancam perekonomian itu sendiri. Kata keamanan sering digunakan dalam hubungan ekonomi, terutama dalam kaitannya dengan investasi. Investasi memiliki risiko ekonomi dan politik (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 103-105).

Dewasa ini, efek yang ditimbulkan oleh investasi bukanlah ancaman ideologis negara lebih terhadap potensi perselisihan sipil. Risiko politik lain yang bersifat tetap sebagai boikot kolektif. Investor di Libya dan Irak telah kehilangan uang sebagai akibat boikot ekonomi internasional (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 103-105).

Tidak seperti perusahaan, negara memiliki kemampuan yang diperlukan untuk sekuritisasi. Mereka diharapkan memiliki struktur yang kuat, berakar dan permanen. Fakta bahwa negara dipandang tidak dapat *collapse* menyebabkan masalah ialah peran mereka sebagai aktor dalam ekonomi global (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 103-105).

Sedangkan perusahaan akan bangkrut dan bubar jika mereka tidak dapat memainkan peran mereka sebagai aktor ekonomi, negara tidak bisa bubar. Negara secara teknis bisa bangkrut (seperti halnya dengan Meksiko selama krisis utang dan hampir lagi pada tahun 1995), tetapi mereka tidak dapat dibubarkan, dan penghuninya tidak bisa dipecat, walaupun banyak yang mencoba bermigrasi (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 103-105).

2.3 Sistem Ekonomi

Salah satu fitur menarik dari sektor ekonomi adalah tingkat sistem itu struktur (pasar, sistem perdagangan, sistem keuangan) dan institusi yang terkait dengan sebagai objek keamanan. Ini berbeda dengan wacana di sektor politik, di mana, meskipun berbagai rezim dan institusi dan bahkan masyarakat internasional sendiri dapat melakukannya sebagai menjadi objek referensi. Struktur anarkis yang seperti itu hampir tidak pernah dibuat dengan cara ini (meskipun obsesi dengan kedaulatan menyiratkan dukungan untuk struktur anarkis) (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 106).

Sejak tahun 1963, Malaysia telah mempunyai dua sistem ekonomi yang berbeda. yaitu sistem Sara Diri dan Sistem Komersil. Sistem Sara Diri adalah kegiatan ekonomi dari kemampuan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya sendiri melalui kegiatan berkebun dan bercocok tanam, perikanan dan kehutanan. Lain halnya dengan sistem Komersil ialah sistem ekonomi yang mengacu pada prinsip pasar terbuka layaknya penanaman modal, investor asing, teknologi baru, pengenalan jenis tanaman baru, dan sebagainya (Ramadani, 2018).

Dalam prekonomian Malaysia, peran pemerintah minim dalam penerapannya sehingga menjadikan mudah dalam hal birokrasi. Banyak pengusaha dari negara-negara lain yang ingin melakukan bisnis di Malaysia karenanya. Imbasnya, hal tersebut mampu mengurangi tingkat pengangguran masyarakat dan menaikkan pendapatan nasional. Kemajuan

teknologi juga berperan dalam mempercepat pembangunan infrastrukturnya. Itulah yang menjadikan perekonomian Malaysia tumbuh dengan pesat (Ramadani, 2018).

Kebijakan Malaysia ini diharapkan memudahkan dalam hal mobilisasi ekonomi serta integrasi ekonomi yang tercipta mampu meningkatkan taraf perekonomian Malaysia. Malaysia dapat dipandang sebagai salah satu negara berkembang yang luar biasa di kawasan Asia Tenggara. Malaysia telah mempraktikkan kebijakan liberal terhadap arus masuk modal asing dan keterbukaan sejak 1957. Ditambah dengan kebijakan yang terkelola dengan baik, perekonomian Malaysia secara bertahap telah berubah dari ekonomi berbasis pertanian menjadi ekonomi multi-sektor dan ekonomi yang didorong oleh ekspor (Tang, Cheam, & Ong, 2015, hal. 1-2).

Menurut Global Competitiveness Report 2012-2013, Malaysia adalah negara pengekspor *tier-one*. Sebagai contoh, indeks ukuran pasar asing menunjukkan bahwa Malaysia berada di urutan ke 20 dari 144 negara pengekspor yang sedang ditinjau. Demikian juga, berdasarkan pangsa ekspor dalam PDB, Malaysia berada di peringkat 10 dari 144 negara pengekspor. Kedua indikator tersebut secara konsisten menandai Malaysia sebagai ekonomi berorientasi ekspor yang mengesankan. Kebijakan perluasan wilayah pelabuhan ialah menjadi bukti bahwa Malaysia serius dalam urusan ekspor-impor mereka (Tang, Cheam, & Ong, 2015, hal. 1-2).

Sesuai menurut pernyataan Buzan, Di atas itu semua, diharapkan dinamika ekonomi kontemporer keamanan akan didominasi oleh kecenderungan globalisasi yang kuat. Tidak seperti hubungan militer dan politik, hubungan ekonomi saat ini sedikit dipengaruhi oleh keadaan geografis serta jarak. Biaya di seluruh dunia pengiriman dan komunikasi saat ini sangat rendah, dan di banyak perusahaan besar yang bergerak secara global (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 95-117).

Banyak pasar, khususnya keuangan yang sekarang beroperasi secara global dan tidak lagi secara berlebihan didiskusikan dalam sistem ekonomi global. Memang, beberapa pengamat melihat pengembangan pembagian kerja skala global yang cukup maju untuk menjadi meminggirkan negara sebagai aktor ekonomi yang sentral (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 95-117).

Karena sifat hubungan ekonomi di bawah liberalisme, ekonomi keamanan adalah subjek yang sangat sulit. Kesulitan ini sebagian harus dilakukan dengan kualitas instrumental unit ekonomi dan rasa tidak aman yang melekat hubungan pasar dan sebagian dengan konsekuensi yang luas dan substansial kegiatan ekonomi di sektor lain (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 95-117).

Perluasan wilayah Pelabuhan Johor ini, agar memudahkan jalur transportasi baik perdagangan maupun mobilisasi penduduk. Ini merupakan contoh dari efek dari liberalisasi. Keterbukaan terhadap dunia luar menuntut adanya sarana dan prasarana yang baik maupun tatanan ekonomi

yang kuat. Ekspor-Import yang merupakan devisa tertinggi Malaysia, membuat pemerintahannya harus mencari cara bagaimana perekonomian Malaysia stabil melalui perdagangan ekspor-import tersebut (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 95-117).

2.4 **Tren Globalisasi**

Kemunculan dan intensifikasi ekonomi pasar global adalah satu dari perkembangan utama zaman kita, dan pertanyaan keamanan yang muncul adalah tentang stabilitas jaringan yang kompleks ini kompetitif dan kolaboratif hubungan.

Sudah lama ada perdebatan tentang destabilisasi yang akan datang tentang tatanan ekonomi internasional liberal akibat turunya pamor Amerika Serikat sebagai hegemonik pemimpin (Hirsch dan Doyle 1977; Keohane 1980, 1984; Strange 1984; Gilpin 1987; Kindleberger 1981).

Dengan berakhirnya Perang Dingin, perdebatan ini terjadi diambil pada Leninis, yang ironis dengan kemungkinan bahwa penghapusan ketakutan mereka bersama terhadap komunisme dan kekuatan Soviet akan menyebabkan pusat-pusat utama kekuatan kapitalis yang jatuh ke dalam krisis persaingan antar individu.

Globalisasi ekonomi yang efisien ini baik untuk konsumen, tetapi itu menempatkan tekanan adaptasi yang luar biasa pada negara dan masyarakat, yang harus terus mengkonfigurasi ulang cara mereka mencari nafkah. Para ekonom paham liberal tampaknya terlalu mudah untuk

dilupakan, untuk menjadi konsumen harus menghasilkan sesuatu untuk diperdagangkan atau dijual.

Di daerah maju yang lebih tua seperti Eropa, persaingan perdagangan yang semakin intensif menghadapi negara-negara dan masyarakat-masyarakat dengan pertanyaan mayor tentang nilai-nilai sosial dan politik (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 95-117).

Retorika Mahathir, utamanya terhadap China, telah membuat investor gelisah atas masa depan sejumlah proyek besar, termasuk pembangunan perumahan di selatan negara itu. Namun pada saat yang sama dengan tetap berpegang pada peringatannya tentang 'versi baru kolonialisme', pemimpin berusia 93 tahun ini juga mengatakan terbuka untuk investasi yang menguntungkan perusahaan dan pekerja lokal. Hal itu mencerminkan keseimbangan yang harus dihadapi Mahathir, antara menenangkan publik yang khawatir tertinggal keuntungan finansial dari proyek-proyek infrastruktur dan realita kebutuhan anggaran untuk pendapatan (Andriani, 2018).

Malaysia telah menanggukkan proyek East Coast Rail Link senilai US\$20 miliar yang didukung oleh China Communications Construction Co. Mahathir juga telah membatalkan tiga proyek pipa gas senilai US\$3 miliar, dua di antaranya terkait dengan unit China National Petroleum Co. Ini mencerminkan suatu sikap proteksionisme dari Mahathir di era globalisasi. Namun, di satu sisi, perluasan kebijakan wilayah pelabuhan adalah bertujuan untuk memudahkan jalur lintas perdagangan ekspor-

impor yang mana hal tersebut mencerminkan mobilisasi dari globalisasi (Andriani, 2018).

Di era globalisasi saat ini, kemudahan serta tak ada jarak antar negara membuat hal positif bagi perekonomian. Perkembangan teknologi serta sarana-pra sarana menjadi penunjang. Malaysia di sini walaupun menanggukkan beberapa proyek tetapi tidak menghentikannya. Hanya ingin melihat lebih dalam lagi seberapa penting proyek-proyek tersebut. Karna perlu adanya pengawasan yang ketat agar hasilnya tepat sasaran. Hal tersebut bukan berarti Malaysia menolak globalisasi, kebijakan perluasan wilayah pelabuhan Johor, merupakan alasan untuk memudahkan mobilisasi kapal laut dagang Malaysia ataupun kapal asing yang ingin berlabuh di sana. Ini merupakan alasan untuk Malaysia memudahkan perdagangan ekspor-impor maupun untuk kapal penumpang.

Perluasan wilayah Pelabuhan Johor tersebut merupakan contoh dari efek globalisasi. Di mana negara-negara dituntut untuk lebih terbuka serta memberikan kemudahan dalam investasi serta mobilisasi penduduk.

Seperti yang telah Buzan jelaskan bahwa, globalisasi ekonomi yang efisien ini baik untuk konsumen, tetapi itu menempatkan tekanan adaptasi yang luar biasa pada negara dan masyarakat, yang harus terus mengkonfigurasi ulang cara mereka mencari nafkah (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 95-117).

2.5 Dinamika Regional

Regionalisasi datang dalam berbagai bentuk integrasi, dengan berbagai tingkat identitas, kedalaman, dan pelebagaan. Mungkin perbedaan utama adalah bahwa antara versi formal, yang terikat dengan aturan, dan memiliki lembaga seperti EU dan versi informal yang dipimpin oleh "proses yang tidak diarahkan melalui interaksi sosial dan ekonomi" seperti yang terjadi di Asia Timur. Seperti halnya level global, level regional dapat di sekuritisasi sendiri atau dapat tumpang tindih dengan sekuritisasi di tingkat negara bagian dan individu. Perdebatan tentang Uni Moneter Eropa memiliki tumpang tindih kualitas.

Rendahnya biaya transportasi dan komunikasi membuat tak terbendung rasa antusiasme terhadap regionalisme ekonomi yang terlihat aneh pada awalnya. Mengingat mobilitas intrinsik memiliki banyak faktor ekonomi (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 112-113).

Dengan demikian, logika regionalisme dari ekonomi dapat dilihat terutama sebagai respons terhadap ancaman *top-down* dari kerangka dominan globalisasi, meskipun, seperti halnya EU, logika *bottom-up* yang signifikan juga mendukungnya. Selama regionalisme ekonomi tetap liberal dalam pandangannya, kedua perkembangannya akan tetap kompatibel. Berbeda dengan situasi di tahun 1930-an, paling kontemporer wilayah yang berada dalam satu regional memiliki struktur perdagangan internal yang cukup liberal dan terbuka dalam banyak hal untuk pasar dunia (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 113-114).

Tujuan dari regionalisasi ekonomi adalah untuk mengurangi tekanan ekonomi global tanpa harus mengorbankan semua sektor dalam perekonomian dalam skala yang besar dan untuk mencoba mengurangi tuntutan manajemen yang berlebihan pada suatu ekonomi global dengan memindahkan banyak dari tuntutan itu ke dalam skala regional.

Secara ekonomi, struktur perdagangan adalah upaya untuk membangun platform operasi yang lebih kuat dan untuk lebih terlibat ke dalam perdagangan yang ketat dan persaingan finansial di pasar global. Dan mereka membentengi cadangan perekonomian jika ekonomi liberal global runtuh karena efek manajemen yang lemah, adanya turbulensi keuangan, atau meningkatnya persaingan perdagangan. Bagian dari fungsi ini adalah tentang keamanan ekonomi, sisanya adalah tentang mencari keuntungan dalam logika persaingan ekonomi-politik dalam pasar global (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 113-114).

Melalui penjabaran di atas, kebijakan Malaysia ini memiliki nilai ekonomi di dalamnya. Unsur-unsur itu dapat terlihat dari wilayah pelabuhan itu yang berada di selat sempit yang merupakan juga salah satu lalu lintas kapal-kapal Malaysia yang membawa hasil alam ke negara-negara lain. Nilai ekspor Malaysia cukup tinggi terutama sektor perkebunan, yang komoditi utamanya ialah Minyak Sawit. Untuk itu, kebijakan perluasan wilayah Pelabuhan Johor memang sangat diperlukan. Akan tetapi ini sedikit mengganggu hubungan antara kedua negara.

Hubungan antara Malaysia-Singapura mengalami pasang surut. Mulai dari kerjasama air bersih yang kurang baik, kemenangan Singapura atas kepemilikan Pedra Branca yang membuat publik Malaysia geram terhadap pemerintahnya. Lalu kini, kebijakan perluasan wilayah Johor tersebut yang dianggap Singapura melanggar batas-batas wilayah Singapura. Namun, tujuan Malaysia ini tak lain untuk terjadinya mobilisasi serta tercapainya integrasi ekonomi yang baik antar negara tetangga ASEAN khususnya Singapura (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 113-114).

Tabel 3.1 Rangkuman dari Analisis berdasarkan konsep pendekatan keamanan milik Buzan

No	Indikator	Sikap Malaysia
1	Sistem Ekonomi	Menerapkan sistem ekonomi yang liberal.
2	Tren Globalisasi	Malaysia menangguhkan kebijakan perluasan tersebut namun akan tetap melakukannya setelah konflik mereda.

3	Dinamika Regional	Malaysia melakukan hubungan kerjasama dengan Singapura dalam penanganan konflik agara tujuan ekonomi mereka tercapai.
---	-------------------	---

Diolah dari buku Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde.

Dapat diartikan bahwa sistem ekonomi yang kuat, adaptasi terhadap globalisasi serta dinamika regional negara merupakan faktor-faktor Malaysia dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Tujuan dari kebijakan ini tak lain untuk menstabilkan serta meningkatkan perekonomian Malaysia. Tindakan atau sikap Malaysia dalam keamanan ekonomi antara lain, Menerapkan sistem ekonomi yang liberal, Malaysia menanggihkan kebijakan perluasan tersebut namun akan tetap melakukannya setelah konflik mereda, Malaysia melakukan hubungan kerjasama dengan Singapura dalam penanganan konflik agara tujuan ekonomi mereka tercapai.